

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud di Dinas BPKAD Kabupaten Dompu

Uswatun Hasanah[✉], M. Ikhwan Mansyuri², Desi Rubiyati³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud pada Dinas BPKAD Kabupaten Dompu. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya risiko kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh faktor individu maupun sistem organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada 30 responden. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tidak etis dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap fraud, sedangkan kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap fraud. Selain itu, ketiga variabel tersebut secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap fraud. Temuan ini mengindikasikan bahwa kecurangan dalam pengelolaan keuangan dapat ditekan melalui pembentukan perilaku etis pegawai, penguatan sistem pengendalian internal, serta pemberian kompensasi yang sesuai dan adil. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam upaya pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Fraud.

Abstract

This study aims to analyze the influence of unethical behavior, internal control systems, and compensation suitability on fraud at the Dompu Regency BPKAD Office. The background of this study is based on the increasing risk of fraud in regional financial management, which is influenced by individual factors and organizational systems. The method used in this study is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires distributed to 30 respondents. Data analysis was carried out using multiple linear regression to test the relationship between the variables studied. The results of the study indicate that unethical behavior and internal control systems have a significant positive effect on fraud, while compensation suitability has a significant negative effect on fraud. In addition, the three variables simultaneously also have a significant effect on fraud. These findings indicate that fraud in financial management can be suppressed through the formation of ethical employee behavior, strengthening the internal control system, and providing appropriate and fair compensation. The implications of this study emphasize the importance of transparent and accountable governance in efforts to prevent fraud in the regional government environment.

Keywords: *Unethical Behavior, Internal Control Systems, Compensation Appropriateness, Fraud.*

Copyright (c) 2025 Uswatun Hasanah

✉ Corresponding author :

Email Address : uswatunhasna11@gmail.com, m.ikhwanmansyuri@stieyapisdompu.ac.id,
desirubiyanti@stieyapisdompu.ac.id

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia saat ini banyak mengalami perkembangan, diantaranya terdapat di perusahaan swasta maupun pemerintahan yang semakin berkembang. Melihat adanya kemajuan perekonomian di era ini selain membawa manfaat bagi masyarakat, juga dapat menjadi sumber masalah. Salah satu permasalahannya adalah kecurangan atau *fraud*. Banyak kasus *fraud* yang menyentuh bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menurut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan terutama birokrasinya yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam atau pihak luar organisasi. Adapun SDM (Sumber Daya Manusia) *Fraud* merujuk pada tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen dalam suatu organisasi yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial bagi perusahaan, serta dapat merusak reputasi dan kepercayaan perusahaan. Ada beberapa jenis SDM *fraud*: penggelapan dana, pemalsuan dokumen, penggunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, penggelapan aset, pencurian identitas, pemalsuan waktu kerja, penggunaan informasi rahasia, penggelapan pajak, pemalsuan laporan keuangan, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk kepentingan pribadi (Institute of Internal Auditors, 2020).

Laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya juga dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya (George, M George, and Garerth, 2002). Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch, jumlah kasus korupsi yang diselidiki KPK, Kejaksaan, dan kepolisian selama tahun 2013 mencapai 560 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 1.271 orang, sedangkan sampai dengan semester 1 tahun 2014 jumlah kasus korupsi sebanyak 308 kasus. Berdasarkan data yang dikeluarkan Transparency International pada tahun 2013 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 114 dari 177 negara. IPK tersebut lebih buruk dibandingkan dengan negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Philipina, Thailand dan Singapura (sumber: intisari-online.com, 18 Agustus 2014). Media Indonesia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 23 UU APBN 2010, pemerintah baru diberi fleksibilitas untuk mengajukan tambahan anggaran belanja hingga mendekati batas defisit maksimum 2%. Jumlah itu setara dengan Rp24 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat jika dibandingkan dengan stimulus infrastruktur 2009 yang hanya Rp12,1 triliun. Hal ini menunjukkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia yang belum baik. Jika kualitas pelaporan tidak baik, maka pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya ekonomi daerah juga patut dipertanyakan. Hasil pemeriksaan BPK lainnya pada 2010 adalah pada pengelolaan atau manajemen aset pada sembilan objek pemeriksaan menunjukkan adanya 91 kasus ketidak patuhan senilai Rp. 34,31 miliar. Data mengenai kecurangan akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi sudah demikian mengkhawatirkan karena telah merugikan negara dalam jumlah besar. Kecurangan dapat dilakukan atau di praktikkan oleh orang-orang dari dalam maupun diluar organisasi ataupun perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Bahkan kecurangan dapat merugikan perusahaan atau negara (Anonymous, 2006). Pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan. Oleh sebab itu, pelaku sulit sekali terdeteksi karena kinerjanya yang tampak telah dipercaya, kemampuan berkomunikasi yang baik, pengalaman kerja yang luas, dan kepribadian yang menarik. Terdapat berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di sector publik, baik yang berupa korupsi (*Corruption*), penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*), maupun (*Fraudulent Statements*). Kecurangan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi).

Menurut (Anonymous, 2006) *fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. Bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan atau negara. Sedangkan menurut (Hogan dan Others, 2008) *fraud* adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian, dan dapat dilakukan oleh individu atau organisasi. Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. *Statement Of Auditing Standart* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan *Stakeholder* atau penggunaan laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2001). Dari tahun ke tahun, nampaknya kasus-kasus *fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan baik yang berasal dari instansi pemerintah (contohnya dinas pemerintah kota, ataupun dinas pemerintah provinsi) maupun instansi swasta (contohnya bank, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya) selalu menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat luas. Namun walau berbagai jenis kasus *fraud* terungkap dan telah di proses oleh hukum belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera berhenti. Justru seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak kasus *fraud* yang terungkap dan bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks. Entah karena sistem di negara kita yang mandul atautah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju. Jangankan sistem pengendalian eksternal yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah adanya *fraud*, sistem pengendalian internal dalam organisasi itu sendiri belum tentu mampu untuk mencegah adanya *fraud*. Apalagi jika para pelaku adalah orang-orang yang memiliki kuasa di dalam organisasi tersebut (Nurani, 2011). Ada berbagai macam *fraud* yang terjadi di lingkungan Instansi pemerintahan dan berlangsung terus menerus seperti air yang mengalir tiada henti. Salah satu jenis kecurangan yang paling banyak menimbulkan atau dapat juga disebut salah satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang dan jasa (Nurani, 2011).

Penelitian ini cenderung menggunakan teori *Fraud Triangle*, karena variabel dalam penelitian ini merupakan suatu proksi dari adanya suatu tekanan, kesempatan, dan pembenaran sesuai dengan dasar teori *Fraud Triangle*. Penelitian ini dilakukan untuk menggali persepsi para pegawai yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu untuk mengetahui kecenderungan terjadinya *Fraud* di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini terdiri dari perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perilaku Tidak Etis Terhadap *Fraud*

Perilaku tidak etis merupakan tindakan yang menyimpang dari prinsip moral, nilai-nilai organisasi, serta norma sosial yang berlaku dalam lingkungan kerja (Trevino dan Nelson, 2011). Perilaku ini dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti penyalahgunaan sumber daya organisasi, penyalahgunaan wewenang, pengabaian tanggung jawab, serta rendahnya integritas dan akuntabilitas. Faktor-faktor yang memengaruhi munculnya perilaku tidak etis antara lain adalah lingkungan kerja yang

permisif, lemahnya pengawasan internal, tekanan atau motivasi individu, serta karakteristik kepribadian. Dalam konteks organisasi, perilaku tidak etis berpotensi menjadi pemicu terjadinya kecurangan (fraud), karena individu yang terbiasa melakukan pelanggaran etika cenderung lebih mudah membenarkan tindak kecurangan untuk mencapai tujuan pribadi maupun kelompok..

H1. Terdapat pengaruh signifikan perilaku tidak etis terhadap fraud

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Fraud

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses integral dalam organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan dapat diandalkan, serta kegiatan organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (COSO, 2013). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap risiko, termasuk risiko terjadinya penipuan (fraud). Sistem pengendalian internal yang efektif mampu mendeteksi potensi kecurangan sejak dini, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan integritas operasional. Indikator yang sering digunakan dalam menilai kualitas pengendalian internal mencakup: pengawasan dan kontrol manajemen, pengendalian dokumen, pengendalian fisik terhadap aset, keterbatasan akses dalam sistem akuntansi, serta kualitas dan konsistensi penerapan pengendalian internal secara menyeluruh.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.

Kesesuaian Kompensasi Terhadap Fraud

Kesesuaian kompensasi merujuk pada tingkat keselarasan antara imbalan yang diberikan organisasi kepada karyawan dengan kontribusi, kinerja, dan tanggung jawab yang diemban (Lawler, 2000). Kompensasi yang sesuai tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku organisasi. Ketidakesesuaian kompensasi baik dalam bentuk ketidakadilan, kurangnya penghargaan atas kontribusi tambahan, maupun tidak adanya meritokrasi dapat menimbulkan ketidakpuasan, menurunkan motivasi, serta mendorong perilaku menyimpang termasuk fraud. Indikator kesesuaian kompensasi mencakup: kinerja pegawai, keadilan kompensasi, penghargaan atas kontribusi tambahan, meritokrasi, kesejahteraan pegawai, serta akuntabilitas dan tanggung jawab dalam sistem kompensasi.

H3: Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap fraud.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis, sistem pengendalian internal, dan kesesuaian kompensasi terhadap fraud pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD, dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program Excel dan SPSS.

Pengujian kualitas data dilakukan melalui uji validitas untuk memastikan bahwa item kuesioner mengukur konstruk yang dimaksud, dan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, linearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi (R^2), uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial, serta uji F untuk mengetahui

pengaruh simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: $Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$, di mana Y adalah fraud, X_1 adalah perilaku tidak etis, X_2 adalah sistem pengendalian internal, dan X_3 adalah kesesuaian kompensasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel

Tabel 1
Frekuensi Distribusi Perilaku Tidak Etis

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	&	F	%	F	%	F	%
X1.1	3	6	7	14	7	14	9	18	4	8	30	60
X1.2	0	0	7	14	3	6	13	26	7	14	30	60
X1.3	1	2	4	8	2	4	15	30	8	16	30	60
X1.4	7	14	8	16	4	8	9	18	2	4	30	60
X1.5	6	12	11	22	6	12	5	10	2	4	30	60

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Tabel 1, diperoleh gambaran mengenai persepsi responden terhadap variabel perilaku tidak etis. Mayoritas responden (18%) setuju bahwa penggunaan fasilitas kantor seperti kendaraan dan mesin fotokopi untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai hal yang wajar. Sebanyak 26% responden setuju bahwa kepala bidang akuntansi berusaha menolak pembayaran fiktif dalam instansi. Selain itu, 30% responden menyatakan setuju jika kepala badan berani menolak permintaan kepala daerah terkait pembelian aset yang tidak sesuai atau melebihi anggaran. Sementara itu, 18% responden setuju jika kepala bidang meminta tiket liburan kepada supplier sebagai imbalan atas penggunaan barang mereka dalam kegiatan dinas. Terakhir, sebanyak 22% responden menyatakan tidak setuju terhadap sikap diam pegawai ketika mengetahui rekan kerja melakukan tindakan yang merugikan instansi. Temuan ini mencerminkan adanya keragaman sikap pegawai terhadap perilaku yang berpotensi menyimpang secara etika dalam lingkungan kerja pemerintahan.

Tabel 2
Frekuensi Distribusi Sistem Pengendalian Internal

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	&	F	%	F	%	F	%
X2.1	6	12	13	26	1	2	7	14	3	6	30	60
X2.2	5	10	11	22	4	8	6	12	4	8	30	60
X2.3	5	10	5	10	10	20	8	16	2	4	30	60
X2.4	4	8	7	14	8	16	7	14	4	8	30	60
X2.5	1	2	4	8	5	10	12	24	8	16	30	60

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh informasi mengenai tanggapan responden terhadap variabel sistem pengendalian internal. Sebagian besar responden (26%) menyatakan tidak setuju bahwa penerapan wewenang dan tanggung jawab dianggap tidak penting, yang

menunjukkan bahwa mereka menilai aspek tersebut sebagai bagian penting dalam pengendalian internal. Sebanyak 22% responden juga tidak setuju jika otorisasi transaksi dan bukti pendukung dapat diabaikan demi percepatan penerbitan laporan keuangan. Pada pernyataan terkait pemeriksaan fisik aset seperti kas dan persediaan, mayoritas responden (20%) bersikap netral jika pemeriksaan hanya dilakukan saat diperlukan. Sebanyak 16% responden juga bersikap netral terhadap ketidakmampuan sistem akuntansi dalam mencatat seluruh informasi operasional. Sementara itu, 24% responden menyatakan setuju terhadap penerapan aturan pemantauan dan evaluasi aktivitas operasional untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan pentingnya pelaksanaan pengendalian internal yang menyeluruh dan konsisten dalam operasional instansi.

Tabel 3
Frekuensi Distribusi Kesesuaian Kompensasi

Item Pernyataan	Skor Jawaban Responden											
	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	&	F	%	F	%	F	%
X3.1	1	2	4	8	11	22	11	22	3	6	30	60
X3.2	3	6	3	6	7	14	10	20	7	14	30	60
X3.3	1	2	2	4	3	6	13	26	11	22	30	60
X3.4	1	2	2	4	5	10	11	22	11	22	30	60
X3.5	0	0	3	6	9	18	11	22	7	14	30	60
X3.6	3	6	1	2	5	10	13	26	8	16	30	60
X3.7	1	2	0	0	6	12	16	32	7	14	30	60
X3.8	0	0	4	8	10	20	13	26	3	6	30	60
X3.9	1	2	0	0	13	26	11	22	5	10	30	60
X3.10	0	0	5	10	10	20	12	24	3	6	30	60

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh gambaran mengenai persepsi responden terhadap variabel kesesuaian kompensasi. Sebagian besar responden (22%) bersikap netral dan setuju bahwa kompensasi keuangan yang diberikan instansi sesuai dengan prestasi kerja pegawai. Sebanyak 20% menyatakan setuju bahwa instansi menciptakan kondisi kerja yang mengakui kompetensi pegawainya. Mayoritas responden (26%) juga setuju bahwa promosi atau kenaikan jabatan diberikan berdasarkan prestasi kerja. Pada aspek manajemen, 22% menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa instansi dikelola dengan baik sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Sebanyak 22% responden juga setuju bahwa tugas penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab yang menantang dan harus diselesaikan tepat waktu, sementara 26% setuju bahwa tugas tersebut memungkinkan pegawai memaksimalkan pengetahuan dan keahlian mereka.

Selain itu, 32% responden menyatakan setuju bahwa gaji yang diterima telah sesuai dengan tingkat pekerjaan mereka. Kemudian, 26% responden menyatakan setuju bahwa instansi memberikan imbalan tunai untuk kegiatan di luar jam kerja, dan persentase yang sama (26%) menyatakan netral terhadap pemberian insentif untuk kerja lembur. Terakhir, 24% responden setuju bahwa tunjangan yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai menilai sistem kompensasi di instansi cukup adil dan sesuai dengan kontribusi serta beban kerja yang mereka jalankan.

Tabel 4
Frekuensi Distribusi Fraud

Skor Jawaban Responden												
Item Pernyataan	STS		TS		N		S		SS		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Y.1	6	12	7	14	7	14	7	14	3	6	30	60
Y.2	7	14	6	12	5	10	9	18	3	6	30	60
Y.3	5	10	12	24	4	8	6	12	3	6	30	60
Y.4	7	14	9	18	5	10	3	6	6	12	30	60
Y.5	7	14	9	18	6	12	4	8	4	8	30	60
Y.6	7	14	11	22	5	10	4	8	3	6	30	60
Y.7	1	2	7	14	8	16	12	24	2	4	30	60
Y.8	8	16	10	20	2	4	6	12	4	8	30	60
Y.9	5	10	8	16	4	8	6	12	7	14	30	60

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh informasi mengenai persepsi responden terhadap praktik fraud di BPKAD Kabupaten Dompu. Pada pernyataan terkait pencatatan biaya lebih besar dari semestinya, mayoritas responden (14%) memiliki pandangan beragam antara tidak setuju, netral, dan setuju. Sebanyak 18% responden setuju bahwa pencatatan bukti transaksi tanpa otorisasi dianggap bukan masalah, sementara 24% responden tidak setuju jika harga beli peralatan kantor dicatat lebih tinggi dari yang seharusnya.

Selanjutnya, masing-masing 18% responden tidak setuju terhadap praktik penggunaan anggaran untuk kebutuhan yang tidak sesuai maupun penggunaan kwitansi kosong atas pembelian perlengkapan kantor. Sebanyak 22% responden juga tidak setuju apabila peralatan yang dibeli tidak sesuai spesifikasi. Namun, 24% responden menyatakan setuju bahwa keberadaan bukti pendukung ganda dalam transaksi bukan suatu masalah. Adapun 20% responden tidak setuju terhadap pengeluaran tanpa dokumen pendukung, dan 16% responden tidak setuju bahwa sisa anggaran boleh dibagikan sebagai bonus kepada pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kepekaan terhadap praktik fraud, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang menunjukkan sikap permisif terhadap beberapa bentuk penyimpangan.

Uji Validitas

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pernyataan	Pearson Correlation	Sig (2-tailed)	keterangan
Perilaku tidak etis	X1.1	.696**	0,000	Valid
	X1.2	.592**	0,001	Valid
	X1.3	.502**	0,005	Valid
	X1.4	.619**	0,000	Valid
	X1.5	.536**	0,002	Valid
Sistem pengendalian internal	X2.1	.843**	0,000	Valid
	X2.2	.771**	0,000	Valid
	X2.3	.714**	0,000	Valid
	X2.4	.697**	0,000	Valid
	X2.5	.479**	0,007	Valid
Kesesuaian kompensasi	X3.1	.768**	0,000	Valid
	X3.2	.767**	0,000	Valid

	X3.3	.645**	0,000	Valid
	X3.4	.771**	0,000	Valid
	X3.5	.848**	0,000	Valid
	X3.6	.834**	0,000	Valid
	X3.7	.416*	0,022	Valid
	X3.8	.653**	0,000	Valid
	X3.9	.534**	0,002	Valid
	X3.10	.490**	0,006	Valid
	Y.1	.736**	0,000	Valid
	Y.2	.748**	0,000	Valid
	Y.3	.865**	0,000	Valid
	Y.4	.884**	0,000	Valid
Fraud	Y.5	.744**	0,000	Valid
	Y.6	.876**	0,000	Valid
	Y.7	.565**	0,001	Valid
	Y.8	.832**	0,000	Valid
	Y.9	.524**	0,003	Valid

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Tabel 5, seluruh item pernyataan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, karena nilai *r hitung* lebih besar dari *r tabel* dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

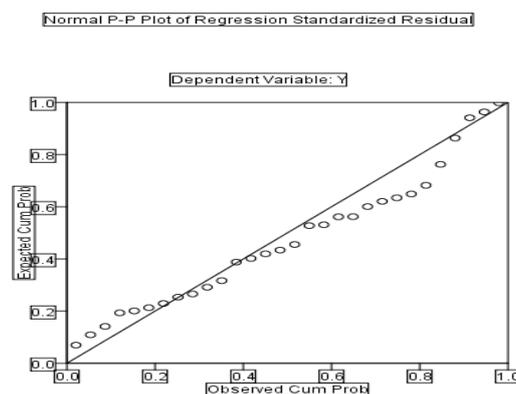
No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Perilaku Tidak Etis	0.532	Reliabel
2	Sistem pengendalian internal	0.749	Reliabel
3	Kesesuaian kompensasi	0.870	Reliabel
4	Kecurangan/fraud	0.904	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan tabel 6 diatas, disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel, dikarenakan mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari 0,60. Sehingga layak untuk digunakan menjadi alat ukuu instrumen kuesioner dalam penelitian ini.

Uji Normalitas

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot



Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Uji Normalitas

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.25732795
Most Extreme Differences	Absolute	.143
	Positive	.143
	Negative	-.080
Kolmogorov-Smirnov Z		.784
Asymp. Sig. (2-tailed)		.571

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena titik-titik data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 7, yang menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,571. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

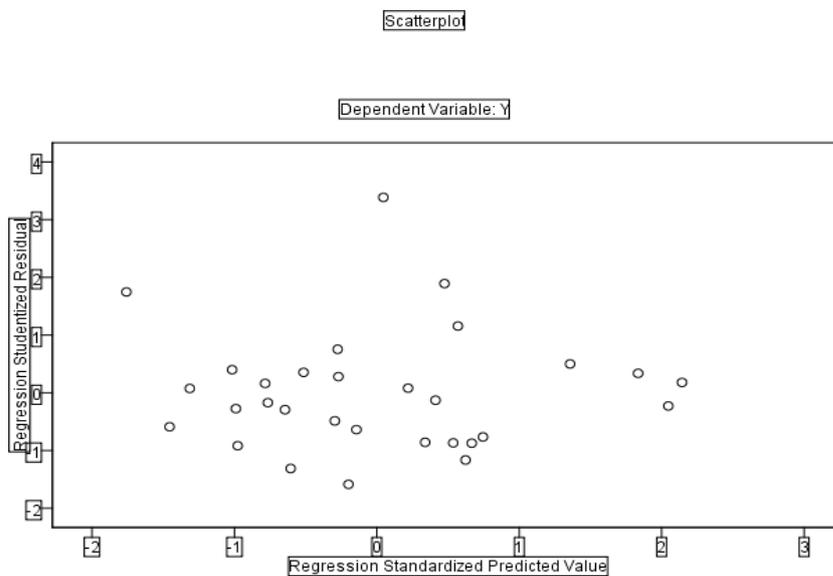
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2.428	7.898		-.307	.761		
Perilaku Tidak Etis	.848	.396	.329	2.144	.042	.785	1.274
Sistem Pengendalian Internal	1.102	.303	.538	3.639	.001	.848	1.179
Kesesuaian Kompensasi	-.068	.190	-.051	-.356	.725	.898	1.114

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan tabel 8, menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan gambar 2, penyebaran titik-titik di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y tanpa pola yang jelas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Linearitas

Tabel 9
Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Fraud *		(Combined)	1531.500	15	102.100	1.734	.155
Sistem pengendalian Internal	Between Groups	Linearity Deviation from Linearity	1016.968	1	1016.968	17.271	.001
	Within Groups		514.532	14	36.752	.624	.806
	Total		824.367	14	58.883		
			2355.867	29			

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan tabel 9. diatas, menunjukkan bahwa nilai *Devation Of Linearity* sig > 0,05, maka terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardize d Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Beta		

1	(Constant)	-2.428	7.898		-.307	.761
	Perilaku Tidak Etis	.848	.396	.329	2.144	.042
	Sistem Pengendalian Internal	1.102	.303	.538	3.639	.001
	Kesesuaian Kompensasi	-.068	.190	-.051	-.356	.725

a. Dependent Variable: Kecurangan/*fraud* (Y)

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan pada tabel 10. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar -2,428 mengindikasikan jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai fraud adalah -2,428. Variabel Perilaku Tidak Etis (X1) memiliki koefisien sebesar 0,848, menunjukkan pengaruh positif terhadap fraud, artinya semakin tinggi perilaku tidak etis, maka fraud juga meningkat. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) memiliki koefisien 1,102, yang juga menunjukkan pengaruh positif terhadap fraud, sehingga peningkatan sistem pengendalian internal justru diikuti oleh peningkatan fraud. Sebaliknya, variabel Kesesuaian Kompensasi (X3) memiliki koefisien -0,068 yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap fraud, artinya semakin sesuai kompensasi yang diberikan, maka tingkat fraud akan menurun.

Uji Hipotesis

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.720 ^a	.518	.462	6.60847

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan tabel 11 diatas, besar angka koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,518 atau 51,8%. Angka tersebut berarti bahwa sebesar 51,8% *Fraud* di dinas BPKAD Kabupaten Dompus yang terjadi dapat dijelaskan dengan variabel Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi. Sementara sisanya yaitu 8,2% harus dijelaskan oleh faktor- faktor penyebab lainnya.

Uji t (*t-test*)

Tabel 12
Hasil Uji t (*t-test*)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	-2.428	7.898		-.307	.761
1 Perilaku tidak etis	.848	.396	.329	2.144	.042
Sistem pengendalian internal	1.102	.303	.538	3.639	.001
Kesesuaian kompensasi	-.068	.190	-.051	-.356	.725

a. Dependent Variable: kecurangan/*fraud* (Y)

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan tabel 12 dapat disimpulkan bahwa:

a. Nilai signifikansi variabel Perilaku Tidak Etis (X1) adalah sebesar 0,042, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 dan t-hitung sebesar 2,144 lebih besar dari t-

tabel sebesar 2,045, hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku tidak etis (X1) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap fraud di dinas BPKAD Kabupaten Dompu (Y), sehingga membuktikan bahwa Ha1 diterima dan H01 ditolak.

- b. Nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) sebesar 0,001, dimana nilai signifikansi tersebut lebih kecil dibandingkan 0,05 dan t-hitung sebesar 3,639 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,045, hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap fraud di dinas BPKAD Kabupaten Dompu (Y), sehingga membuktikan bahwa Ha2 diterima dan H02 ditolak.
- c. Nilai signifikansi variabel Kesesuaian Kompensasi (X3) sebesar 0,725, dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan t-hitung sebesar -0,356 lebih kecil dari t-tabel sebesar 2,045, hasil tersebut menunjukkan bahwa Kesesuaian Kompensasi (X3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap fraud di dinas BPKAD Kabupaten Dompu (Y), sehingga membuktikan bahwa Ha3 ditolak dan H03 diterima.

Uji F (*F-test*)

Tabel 12
Hasil Uji F (*F-test*)

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1220.396	3	406.799	9.315	.000 ^a
	Residual	1135.470	26	43.672		
	Total	2355.867	29			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah SPSS. 2025

Berdasarkan Tabel 12, nilai F-hitung sebesar 9,315 dengan probabilitas 0,000 menunjukkan bahwa model regresi signifikan, karena probabilitas $< 0,05$ dan F-hitung $> F$ -tabel (3,35). Dengan demikian, variabel Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap fraud di BPKAD Kabupaten Dompu. Hal ini membuktikan bahwa Ha4 diterima dan Ho4 ditolak.

Perilaku Tidak Etis Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya fraud di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu. Koefisien regresi sebesar 0,848 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pegawai, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud. Perilaku menyimpang seperti penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, penerimaan pembayaran fiktif, hingga sikap diam terhadap penyimpangan terbukti dapat menjadi pemicu meningkatnya tindakan fraud dalam suatu organisasi.

Temuan ini diperkuat oleh berbagai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara perilaku tidak etis dengan peningkatan risiko terjadinya fraud, khususnya dalam lingkungan instansi pemerintah. (Utama & Yuniarta, 2020) mengungkapkan bahwa perilaku tidak etis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan di instansi pemerintah daerah. Artinya, semakin

tinggi intensitas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu di lingkungan kerja, maka semakin besar pula potensi terjadinya manipulasi laporan dan tindakan curang lainnya yang merugikan lembaga. Selain itu, (Fitnantyo Bimawan, 2021) juga menemukan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap fraud, yang menunjukkan bahwa sikap atau tindakan yang menyimpang dari norma dan nilai-nilai organisasi cenderung mendorong individu untuk melakukan kecurangan, terlebih jika tidak disertai dengan pengawasan internal yang ketat dan sistem sanksi yang jelas. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian tersebut menguatkan bahwa perilaku tidak etis merupakan salah satu faktor krusial yang perlu diantisipasi dalam upaya pencegahan fraud di sektor pemerintahan.

Dengan demikian, hasil-hasil tersebut menunjukkan pentingnya membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan etika kerja sebagai upaya preventif dalam meminimalkan risiko terjadinya fraud di lingkungan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Internal Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian, variabel sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif terhadap fraud dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,102. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang tidak berjalan secara efektif justru memberikan peluang terjadinya fraud di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu. Meskipun pada prinsipnya sistem pengendalian internal dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, lemahnya implementasi serta kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaannya dapat membuka celah terjadinya penyimpangan atau tindakan fraud.

Penelitian ini didukung oleh studi sebelumnya. (Rahman, 2020) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap fraud. (Suryani dan Akbar, 2022) juga menemukan bahwa ketidakkonsistenan dalam penerapan sistem pengendalian internal di institusi publik merupakan faktor utama meningkatnya kasus korupsi dan fraud. (Farhan dan Safitri, 2023) menambahkan bahwa semakin lemah efektivitas pengendalian internal, maka semakin besar risiko terjadinya kecurangan. Dan tidak sejalan dengan (Apriliyani Wulandari, 2021) yang menemukan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dengan demikian, penting bagi instansi pemerintah untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya menjadi dokumen formal semata, melainkan benar-benar dijalankan secara konsisten dan diawasi secara berkala guna meminimalkan potensi terjadinya fraud.

Kesesuaian Kompensasi Terhadap *Fraud*

Berdasarkan hasil penelitian, variabel kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap fraud, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,068. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin sesuai kompensasi yang diberikan kepada pegawai, maka kecenderungan terjadinya fraud semakin menurun di lingkungan BPKAD Kabupaten Dompu. Kompensasi yang adil dan proporsional, sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, serta kinerja pegawai, dapat berperan sebagai salah satu bentuk pencegahan terhadap perilaku curang atau penyimpangan.

Hasil ini diperkuat oleh berbagai studi sebelumnya. (Febiola & Sari, 2024) menunjukkan bahwa kompensasi yang memadai dan transparan dapat menurunkan niat karyawan untuk melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Penelitian dari Wulandari dan

Arfan (2021) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa tingkat fraud cenderung lebih rendah pada organisasi yang memberikan kompensasi sesuai kinerja serta menerapkan sistem penghargaan yang adil. Rahmawati dan Yusuf (2023) menambahkan bahwa ketidaksesuaian kompensasi sering kali memicu rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan, yang pada akhirnya dapat mendorong munculnya tindakan curang.

Dengan demikian, pengelolaan kompensasi yang profesional dan proporsional menjadi langkah strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, transparan, dan bebas dari potensi fraud.

SIMPULAN

H1. Perilaku Tidak Etis mempunyai pengaruh signifikan terhadap fraud di Dinas BPKAD Kabupaten Dompu. Hal ini membuktikan bahwa perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pegawai, seperti penyalahgunaan wewenang atau kelalaian, dapat menambah atau bahkan membuka peluang terjadinya kecurangan (fraud) dalam lingkungan kerja.

H 2. Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh signifikan terhadap fraud di Dinas BPKAD Kabupaten Dompu. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang diterapkan secara konsisten dan efektif mampu mencegah serta meminimalisir peluang terjadinya kecurangan (fraud) di instansi pemerintah.

H 3. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap fraud di Dinas BPKAD Kabupaten Dompu. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemberian kompensasi yang adil, transparan, dan sesuai dengan kinerja dapat menurunkan motivasi pegawai untuk melakukan tindakan curang (fraud).

H 4. Perilaku Tidak Etis, Sistem Pengendalian Internal, dan Kesesuaian Kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap fraud di Dinas BPKAD Kabupaten Dompu. Hal ini mempertegas bahwa kombinasi faktor individual dan struktural dalam organisasi secara bersama-sama dapat memengaruhi tingkat terjadinya fraud.

Referensi :

- Anynomous. (2006), Indonesia 2005-2025 Buku Putih. Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jakarta.
- Benson, Michael L. & Simpson, Sally S. (2010). *White-collar Crime: An Opportunity Perspective*. New York: Taylor & Francis e-Library.
- Buckley, M. R. (2019). *The Oxford Handbook of Workplace Deviance*.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44 (4), 588-608.
- Dita Purnamasari. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyediaan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM Di Kecamatan Rumbai Pesisir. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Riau.
- Edward, E. Lawler III. (2000). *Pay and Organizational Effectiveness: A Psychological View*. McGraw-Hill.
- Febiola, F., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi: Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 332-346. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.888>
- Fitnantyo Bimawan. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang

- Dan Jasa di Kota Semarang. *Serat Acitya*, 10(2), 12-21.
<https://doi.org/10.56444/sa.v10i2.638>
- George, J.M., and Gareth R.Jones. (2002). *Organizational Behavior*. Prentice Hall, New Jersey.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Handoko, T. H. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE Yogyakarta.
- Hogan, C. E., Rezaee, Z., Riley, R. A., & Velury, U. K. (2008). *Financial Statement Fraud: Prevention and Detection*. John Wiley & Sons.
- IAI. (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- IIA. (2020). *Certified Internal Auditor (CIA)*. Indonesia.
- Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.3 | No.1 | 2015. Meningkatkan Signifikan pada 2013-2014 (intisari-online.com, 18 Agustus 2014).
- Linda, K. Trevino & Katherine A. Nelson. (2011). *Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do it Right*. John Wiley & Sons.
- Nuranijatiningtyas. (2011). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang*. Fakultas ekonomi.
- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 20-27.
<https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods For Business: A skill-building approach*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Apriliyani Wulandari, D. (2021). Analisis Determinan yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BPKAD Kabupaten Dompu). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 989-998.
- Febiola, F., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan Akuntansi: Studi Empiris pada OPD Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 332-346.
<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.888>
- Fitnantyo Bimawan. (2021). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa di Kota Semarang. *Serat Acitya*, 10(2), 12-21.
<https://doi.org/10.56444/sa.v10i2.638>
- Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 3(1), 20-27.
<https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA>
- Utama, G. P., & Yuniarta, G. A. (2020). Pengaruh Ineffective Monitoring, Komitmen Organisasi, Kultur Organisasi, Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3), 630-639.